

## **Analisis Geostrategis Institut Agama Islam Negeri Langsa Dalam Upaya Penekanan Angka Kemiskinan Di kota Langsa**

Faisal Umardani Hasibuan, Andi Tarlis  
Email: [faisal.hasibuan@iainlangsa.ac.id](mailto:faisal.hasibuan@iainlangsa.ac.id), [anditarlis@gmail.com](mailto:anditarlis@gmail.com)

**Institut Agama Islam Negeri Langsa  
Jl. Meurandeh, Langsa Lama, Kota Langsa, Aceh**

### **Abstract:**

Development is a process of change in a better direction through continuous efforts from the previously less good to be better. As part of the community, religious colleges must be pro-active in empowering the rural poor with a variety of approaches, namely the first approach through the language of religion, the two scientific approaches as characteristics of scientific and human work, the three approaches that empower people with an emphasis on human (HR development) and the four approaches that refer to the needs felt by the community. Significant factors influencing the level of poverty in Langsa City are changes in GDP (economic growth), education level, unemployment and PDRB share of the agricultural sector. Economic growth, an increase in the level of education and an increase in the share of GRDP in the agricultural sector will reduce the level of poverty, while the increase in the number of unemployed people will increase the level of poverty.

**Keywords: Geostrategis, Poverty, unemployment**

### **Abstrak:**

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terus menerus dari yang sebelumnya kurang baik menjadi lebih baik. Sebagai bagian dari masyarakat, perguruan tinggi agama harus pro aktif melakukan pemberdayaan masyarakat miskin di pedesaan dengan berbagai macam pendekatan, yaitu pertama pendekatan melalui bahasa agama, kedua pendekatan ilmiah sebagai ciri kerja insan dan lembaga ilmiah, ketiga pendekatan yang memberdayakan masyarakat dengan penekanan pada unsur manusia (pengembangan SDM) dan keempat pendekatan yang mengacu pada kebutuhan teras masyarakat. Faktor yang signifikan memengaruhi tingkat kemiskinan di Kota Langsa yaitu perubahan PDRB (pertumbuhan ekonomi), tingkat pendidikan, jumlah pengangguran dan *share* PDRB sektor pertanian. Pertumbuhan ekonomi, kenaikan tingkat pendidikan dan kenaikan *share* PDRB sektor pertanian akan menurunkan tingkat kemiskinan, sedangkan kenaikan jumlah pengangguran akan menaikkan tingkat kemiskinan.

**Kata Kunci : Geostrategis, Kemiskinan, pengangguran**

## **PENDAHULUAN**

Pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Dengan kata lain pembangunan merupakan suatu

## **Analisis Geostrategis Institut Agama Islam Negeri Langsa Dalam Upaya Penekanan Angka Kemiskinan Di kota Langsa**

Faisal Umardani Hasibuan, Andi Tarlis

proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terus menerus dari yang sebelumnya kurang baik menjadi lebih baik. Kemunculan makna pembangunan terjadi setelah perang dunia II yang ditandai dengan fenomena-fenomena penting yang terlihat dari negara-negara yang baru merdeka yaitu fenomena keterbelakangan dan kemiskinan. Di Indonesia, kata pembangunan sudah menjadi kata kunci bagi segala hal, secara umum kata ini diartikan sebagai usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat dan warganya, kemajuan ini sering kali ditandai dengan kemajuan yang dicapai oleh suatu masyarakat dibidang ekonomi.

Kemiskinan merupakan fenomena dan masalah yang selalu nampak pada masyarakat pedesaan di negara-negara yang sedang berkembang. Robert S. Me Namara-sebagaimana dikutip oleh Robert Chambers menyatakan bahwa tidak kurang dari 800 juta jiwa masyarakat di negara dunia ketiga termasuk di dalamnya Indonesia (Robert S Me Namara: 1998), terperangkap dalam kemiskinan absolut, yang antara lain ditandai oleh keadaan penghidupan mereka yang kurang gizi, wabah penyakit, lingkungan kumuh, tingginya angka kematian bayi, rendahnya harapan hidup (Oesman Fauzi : 2015).

Penanggulangan kemiskinan merupakan fokus perhatian semua negara di dunia. Bahkan dari delapan butir *Millenium Development Goals (MDGs)* yang ditandatangani oleh 189 negara anggota PBB, memberantas kemiskinan dan kelaparan merupakan butir pertama dari *MDGs* (Tulus Tambunan: 2001). Pembangunan dengan tujuan membebaskan masyarakat dari kemiskinan telah dilaksanakan bangsa Indonesia sejak awal kemerdekaan tahun 1945 sampai kini, namun tujuan tersebut relatif banyak mengalami kegagalan lebih-lebih pada Era Reformasi saat ini. Sampai saat ini belum ada gejala-gejala kuat yang mengarah pada terberantasnya masyarakat dari sindrom kemiskinan, bahkan cenderung lebih parah lagi. Bila hal yang dernikian itu tidak segera dipikirkan dan dilakukan upaya-upaya penanggulangannya secara baik, maka pada saatnya nanti akan melahirkan *lost generation* dan tidak memiliki potensi yang bisa diandalkan untuk mengejar ketertinggalan dibidang pembangunan bangsa. Akibatnya masyarakat dan bangsa akan semakin mengalami kesulitan dan beban hidup yang berat.

Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan

mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur, tujuan pemerintah aceh dalam mengupayakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan tujuan mencegah tumbuh dan berkembangnya permasalahan kesejahteraan sosial, mensejahterakan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup, memulihkan fungsi sosial dalam hal kemandirian (Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013).

Permasalah strategis yang ada di provinsi Aceh tidak jauh beda dengan permasalahan yang ada di tingkat nasional, yaitu persoalan kemiskinan yang masih relatif tinggi. Oleh karena itu menjadi tanggung jawab pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, sebagai penyangga dalam proses perbaikan taraf kehidupan masyarakat miskin. Pemerintah memiliki tanggungjawab mencari jalan keluar dan merumuskan langkah-langkah strategis dalam rangka pengetasan kemiskinan (Badan Pusat Statistik : 2011).

**Tabel 1**  
**Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Aceh**  
**Tahun 2007 – 2011**

No	Tahun	Jumlah Penduduk Miskin
1	2007	1083,7
2	2008	959,7
3	2009	892,86
4	2010	861,85
5	2011	900,19

Berbagai upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia telah dilakukan, khususnya di Kota Langsa Provinsi Aceh, bahwa dalam kurun waktu 10 tahun terakhir pertumbuhan kemiskinan di Kota Langsa rata-rata hanya 1,70 ribu jiwa atau 28,30% artinya sekalipun mengalami penurunan jumlahnya tidak signifikan. Apalagi dalam jumlah waktu yang tidak sebentar yakni selama 10 tahun, sementara data kemiskinan memang menjadi suatu hal yang sulit dihilangkan atau setidaknya dapat diminimalisirkan di Indonesia pada umumnya dan Kota Langsa pada khususnya (BPS Kota Langsa : 2016).

## Analisis Geostrategis Institut Agama Islam Negeri Langsa Dalam Upaya Penekanan Angka Kemiskinan Di kota Langsa

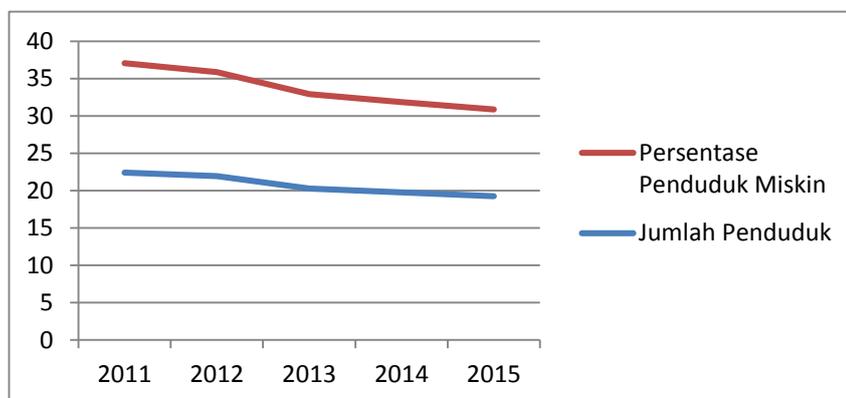
Faisal Umardani Hasibuan, Andi Tarlis

Melalui Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Langsa, dalam kurun waktu 5 tahun jumlah rakyat miskin mengalami jumlah yang simpang siur. Pada tahun 2011 berada pada angka 22,40 ribu jiwa penduduk miskin atau 14,66%, pada tahun 2012 berkurang dan menyentuh angka 21,92 ribu jiwa penduduk atau 13,93%, pada tahun 2013 menyentuh angka 20,27 ribu jiwa penduduk atau 12,62%, pada tahun 2014 19,76 ribu jiwa penduduk atau 12,08%, pada tahun 2015 menyentuh angka 19,22 ribu jiwa penduduk atau 11,62%, artinya antara tahun 2011 hingga tahun 2015 kemiskinan di Kota Langsa mengalami penurunan namun tidak signifikan, yakni hanya selisih

**Tabel 2**  
**Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kota Langsa**  
**Tahun 2011 – 2015**

No	Kabupate/Kota	Tahun	Jumlah Penduduk (ribu jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)
1	Kota Langsa	2011	22.40	14.66
		2012	21.92	13.93
		2013	20.27	12.62
		2014	19.76	12.08
		2015	19.22	11.62

**Grafik 1**  
**Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kota Langsa**  
**Tahun 2011 – 2015**



Perguruan Tinggi Agama Islam sebagaimana perguruan tinggi lainnya, dalam kiprahnya tidak dapat dipisahkan dari konsep Tri Darma Perguruan Tinggi, yaitu: menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian serta pengabdian kepada

masyarakat. Yang disebut terakhir ini, dijadikan sebagai ujung tombak untuk menunjukkan eksistensi suatu Perguruan Tinggi Islam dalam memberikan nilai manfaat terhadap lingkungannya (Ali Hasymi : 1994).

Pada era mendatang di mana problematika sosial yang muncul di tengah masyarakat kian kompleks, maka peran serta Perguruan Tinggi Agama Islam dituntut untuk semakin aktif, dinamis dan berkualitas dalam memberikan sumbangan demi pengentasan kemiskinan di masyarakat terutama masyarakat Kota Langsa. Apalagi jika dikaitkan dengan tanggung jawab Perguruan Tinggi dalam merekonstruksikan bangunan wajah masa depan manusia Indonesia yang berkualitas, jelas menunjukkan bahwa kehadirannya di tengah-tengah masyarakat yang sedang membangun dalam mengatasi kemiskinan akan semakin menonjol.

## **TINJAUAN TEORITIK**

### **Kemiskinan**

Kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat (Rustanto, Bambang : 2015). Hak-hak dasar antara lain terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik.

Sedangkan hal senada menyatakan bahwa kemiskinan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan standar hidup minimum (Tambunan, Tulus : 2001). Kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang ditandai dengan pengangguran dan keterbelakangan yang kemudian meningkat menjadi ketimpangan (Kartasasmita : 1995).

Dari berbagai defenisi yang telah disebutkan sebelumnya dapat dijelaskan bahwa fenomena kemiskinan yang terjadi di Indeonesia dapat diartikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan yang dialami individu, kolompok, dan keluarga untuk memenuhi kebutuhan standar hidup. Contohnya seperti pendidikan yang rendah, sehingga banyak yang menganggur dan tidak bekerja serta banyak warga yang belum mampu mengakses program maupun pelayanan pemerintah sehingga sulit memenuhi kebutuhannya.

# **Analisis Geostrategis Institut Agama Islam Negeri Langsa Dalam Upaya Penekanan Angka Kemiskinan Di kota Langsa**

Faisal Umardani Hasibuan, Andi Tarlis

## **Jenis-Jenis Kemiskinan**

**Kemiskinan Relatif;** Kemiskinan dilihat dari aspek ketimpangan sosial, karena ada orang yang sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya tetapi masih jauh lebih rendah dibanding masyarakat sekitarnya (lingkungannya). Semakin besar ketimpangan antara tingkat penghidupan golongan atas dan golongan bawah maka akan semakin besar pula jumlah penduduk yang dapat dikategorikan miskin, sehingga kemiskinan relatif erat hubungannya dengan masalah distribusi pendapatan. Kemiskinan dinegara berkembang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: (1) perbedaan geografis, jumlah penduduk dan tingkat pendapatan, (2) perbedaan sejarah, sebagian dijajah oleh Negara yang berlainan, (3) perbedaan kekayaan sumber daya alam dan kualitas sumber daya manusianya, (4) perbedaan peranan sektor swasta dan negara, (5) perbedaan struktur industri, (6) perbedaan derajat ketergantungan pada kekuatan ekonomi dan politik negara lain dan (7) perbedaan pembagian kekuasaan, struktur politik dan kelembagaan dalam negeri (Moh.Abu Suhud : 2002).

**Kemiskinan Absolut;** Kemiskinan yang dikaitkan dengan perkiraan tingkat pendapatan dan kebutuhan yang hanya dibatasi pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang untuk hidup secara layak. Dengan demikian kemiskinan diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan orang dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memperoleh kebutuhan dasarnya yakni makanan, pakaian dan perumahan agar dapat menjamin kelangsungan hidupnya. Bank Dunia menghitung garis kemiskinan absolut dengan menggunakan pengeluaran konsumsi yang dikonversi ke dalam US\$ PPP (*Purchasing Power Parity/Paritas Daya Beli*), bukan nilai tukar US\$ resmi. Tujuannya untuk membandingkan tingkat kemiskinan antarnegara. Angka konversi PPP menunjukkan banyaknya rupiah yang harus dikeluarkan untuk membeli sejumlah kebutuhan barang dan jasa dimana jumlah yang sama tersebut dapat dibeli seharga US\$1 di Amerika (Badan Pusat Statistik Nasional : 2009).

## **Indikator Kemiskinan**

Untuk mengukur kemiskinan, Indonesia melalui Badan Pusat Statistik menggunakan pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs*) yang dapat diukur dengan angka atau hitungan Indeks Perkepala (*Head Count Index*), yakni jumlah dan

persentase penduduk miskin yang berada dibawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan ditetapkan pada tingkat yang selalu konstan secara riil sehingga kita dapat mengurangi angka kemiskinan dengan menelusuri kemajuan yang diperoleh dalam mengentaskan kemiskianan sepanjang waktu.

Dimensi kemiskinan menyangkut aspek ekonomi, politik dan sosial-psikologis”. Secara ekonomi, kemiskinan dapat didefinisikan sebagai kekurangan sumber daya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. Sumber daya dalam konteks ekonomi tidak hanya menyangkut aspek finansial tetapi meliputi semua jenis kekayaan (*wealth*) yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas (Umami : 2013).

Berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar, ada tiga indikator dasar kemiskinan yang digunakan (Revallion M : 2006): (a) Head Count Index (*HCI-P0*), yaitu persentase penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan, (b) Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Powerty Gap Index-P1*) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan melihat seberapa miskin orang miskin itu. Semakin tinggi nilai indeks kedalaman kemiskinan semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. (c) Indeks Keparahan Kemiskinan (*Powerty Severity Index-P2*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks keparahan kemiskinan menunjukkan semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini pada dasarnya bertujuan untuk menghasilkan gambaran akurat dalam memecahkan dan menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi atas apa yang diteliti untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan demikian, peneliti dalam hal ini membutuhkan metode penelitian yang tepat dan relevan dalam melakukan penelitian untuk mendapatkan hasil sesuai tujuan peneliti. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan (Sugiyono : 2013).

# **Analisis Geostrategis Institut Agama Islam Negeri Langsa Dalam Upaya Penekanan Angka Kemiskinan Di kota Langsa**

Faisal Umardani Hasibuan, Andi Tarlis

Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Darmadi, Hamid : 2013). Oleh Karena itu, metode penelitian ini merupakan salah satu hal penting yang dilakukan peneliti agar suatu penelitian yang dilakukan dapat memiliki hasil penelitian yang valid dan objektif.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif, yang mana menurut (Sugiyono : 2010) menjelaskan bahwa metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN**

Penelitian ini mengambil lokasi di Institut Agama Islam Negeri Langsa yang berada di Jalan Cot Kala Meurandeh Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa adalah peralihan dan peningkatan status dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa (Sejarah Kampus; <http://iainlangsa.ac.id/hal/sejarah-kampus>). Peralihan ini sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 146 Tahun 2014 yang ditandatangani langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Zawiyah Cot Kala sendiri didirikan pada tahun 1980 merupakan hasil keputusan Seminar Sejarah Islam di Rantau Pertamina Kuala Simpang, bahkan nama tersebut diambil dari sebuah nama lembaga pendidikan tinggi terbesar di Asia Tenggara yang tertua di Bayeun sekitar abad ke-4 H.

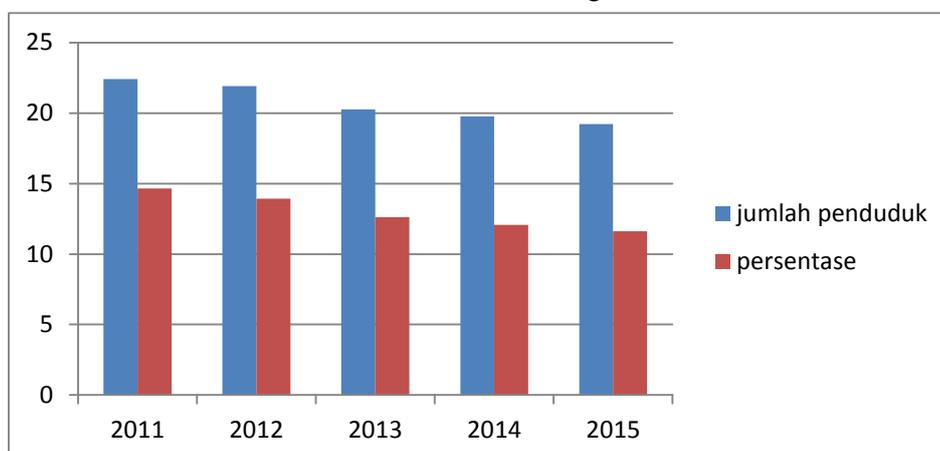
Awalnya IAIN Langsa ini didirikan dalam bentuk Lembaga Institut Agama Islam (IAI) Zawiyah Cot Kala Langsa yang meliputi tiga Fakultas, yaitu Fakultas Syari'ah, Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Dakwah. Pembukaan kuliah pertama sekali pada tanggal 14 Oktober 1980 hanya diresmikan 2 (dua) Fakultas, Fakultas Tarbiyah

yaitu Jurusan Pendidikan Agama Islam dan Fakultas Dakwah yaitu Jurusan Penerangan Agama sampai tingkat sarjana muda. Pada tahun 1981 dibentuk Yayasan dengan Akte Notaris No. 7 tanggal 21 Juli 1981 dan pada tahun 1982 dalam kunjungannya Menteri Agama Republik Indonesia ke Langsa (H.Alamsyah Ratu Perwiranegara) dalam rangka peresmian Departemen Agama Propinsi Daerah Istimewa Aceh oleh pengurus Yayasan menyampaikan Surat Pemohonan Terdaftar IAI Zawiyah Cot Kala Langsa, maka pada tahun 1983 keluarlah SK Dirjen Lembaga Islam Departemen Agama RI untuk terdaftarnya dengan SK Nomor: Kep/E/III/PP.00.2/1303/83 tanggal 16 April 1983, dan kemudian pada tahun 1988 dengan keputusan Menteri Agama RI, maka IAI Zawiyah Cot Kala Langsa terdaftar s/d jenjang S-1 dengan SK Menteri Agama RI Nomor : 219 Tahun 1988 tanggal 1 Desember 1988, kemudian sejak tahun 1997 berubah bentuk menjadi STAI (Sekolah Tinggi Agama Islam).

### **Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Kota Langsa**

Perkembangan persentase penduduk miskin di Kota Langsa Provinsi Aceh dari tahun 2011 -2015 mengalami penurunan, yaitu 14,66 persen pada tahun 2011, menurun menjadi 13,93 persen tahun 2012, hingga mencapai angka 12,62 persen pada tahun 2013. Demikian pula dengan penduduk miskin yang mengalami penurunan dari 19,76 ribu jiwa pada tahun 2014 menjadi 12,08 persen sehingga pada tahun 2015 mengalami penurunan 11,62 persen. Hal ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam pencapaian pembangunan ekonomi di Kota Langsa.

Tabel 3  
Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin di Kota Langsa  
Tahun 2011 - 2015



# **Analisis Geostrategis Institut Agama Islam Negeri Langsa Dalam Upaya Penekanan Angka Kemiskinan Di kota Langsa**

Faisal Umardani Hasibuan, Andi Tarlis

## **Faktor Penyebab Kemiskinan di Kota Langsa**

### **1. Rendahnya Pertumbuhan Ekonomi**

Laju pertumbuhan ekonomi kota sepanjang tahun 2007-2011 masih cenderung tumbuh lambat dari pertumbuhan ekonomi nasional, meskipun terus bergerak naik dalam dua tahun terakhir. Dalam kurun waktu tersebut, pertumbuhan ekonomi kota juga menunjukkan fluktuasi. Kondisi tersebut mengindikasikan fondasi ekonomi Kota Langsa masih rawan dari berbagai gejolak dan guncangan ekonomi, baik dipicu secara internal maupun eksternal. Simon Kuznez mendefenisikan pertumbuhan ekonomi suatu negara sebagai peningkatan kemampuan suatu negara untuk menyediakan barang – barang ekonomi penduduknya, kenaikan pada kemampuan ini disebabkan oleh adanya kemajuan teknologi, kelembagaan serta penyesuaian idiologi yang dibutuhkan (Todaro, Michael P, Smith : 2006). Ketiga komponen pokok dari defenisi ini sangatlah penting maknanya bagi suatu perekonomian, yaitu: (a) Kenaikan *output* nasional secara terus menerus merupakan perwujudan dari pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan kemampuan suatu perekonomian dalam menyediakan berbagai macam barang ekonomi, dan juga tanda kematangan ekonomi. (b) Kemajuan teknologi merupakan syarat perlu (*neccesary condition*) bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, namun bukan syarat cukup (*sufficiebt condition*) dalam merealisasikan potensi pertumbuhan yang terkandung dalam teknologi baru. Penyesuaian kelembagaan, sikap dan idiologi harus segera dilakukan. Adanya inovasi teknologi tanpa adanya inovasi sosial ibarat sebuah bola lampu tanpa aliran listrik. Potensi ada namun tanpa input yang melengkapi tidak akan berarti apa-apa.

#### **Rekaman Kejadian (Moment Opname)**

*“ Redahnya pertumbuhan ekonomi di Kota Langsa salah satunya adalah ketidak mampuan masyarakat mengelola potensi – potensi sumber daya alam yang dimiliki di pedesaan sebagai salah satu sumber penghasilan demi mencukupi kehidupan sehari – hari, ..... dalam hal ini pemerintah setempat terus membina dalam hal pembinaan pemberdayaan masyarakat sehingga pengetahuan masyarakat terbuka dan memotivasi untuk mengelola sumber daya alam yang dimiliki guna mencukupi kebutuhannya”*(Riza Muhammad :2017).

## 2. Tingginya Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran

Kurun waktu 2007-2011, tingkat kemiskinan kota cenderung lebih tinggi dari angka kemiskinan nasional, meskipun terlihat lebih rendah dari provinsi. Tahun 2011, angka persentase kemiskinan di kota mencapai 14,66 persen, sementara kemiskinan nasional sebesar 12,49 persen dan provinsi sebesar 19,57 persen. Masih rendahnya capaian pertumbuhan ekonomi selama beberapa tahun terakhir menyebabkan terhambatnya pengurangan angka kemiskinan kota. Tahun 2007, tingkat kemiskinan kota hanya sebesar 14,25 persen dan naik menjadi 14,66 persen tahun 2011.

Pengangguran adalah masalah makre ekonomi yang mempengaruhi manusia secara langsung dan merupakan masalah yang paling berat. Bagi kebanyakan orang, kehilangan pekerjaan berarti penurunan standar kehidupan dan tekanan psikologis. Jadi tidaklah mengejutkan jika pengangguran menjadi topik yang sering dibicarakan dalam perdebatan politik dan para politisi seiring mengklaim bahwa kebijakan yang mereka tawarkan akan membantu menciptakan lapangan pekerjaan.

Rekaman Kejadian (Moment Opname)

*“Tingginya tingkat kemiskinan dan Pengangguran di Kota Langsa ini sebenarnya tanggung jawab dari pemerintah, akan tetapi juga merupakan salah satu kesadran masyarakatnya yang mana bisa membantu program pemerintah dari penanggulangan kemiskinan. Pengangguran memang tidak bisa kita cegah kalau masyarakatnya masih banyak mengharapkan bantuan dari pemerintah. Hal ini memang kurang kesadaran masyarakat untuk mencari kerja”*(Nurjannah : 2017).

## 3. Rendahnya Produktivitas UMKM

Koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan basis ekonomi kerakyatan dan menempati posisi strategis dalam upaya mendorong perekonomian kota, memperluas penyerapan tenaga kerja, dan meningkatkan kesejahteraan warga kota. Berbagai program pembangunan yang digulirkan dalam kurun waktu lima tahun terakhir diakui bahwa berdampak positif dalam upaya pemberdayaan koperasi dan UMKM. Di sisi lain, koperasi dan UMKM masih pula dihadapkan berbagai permasalahan klasik yang belum teratasi secara tuntas sehingga memerlukan penanganan cepat dan berkelanjutan. Berbagai masalah tersebut telah menyebabkan

# **Analisis Geostrategis Institut Agama Islam Negeri Langsa Dalam Upaya Penekanan Angka Kemiskinan Di kota Langsa**

Faisal Umardani Hasibuan, Andi Tarlis

rendahnya produktivitas koperasi dan UMKM di kota. Dibalik kontribusi UMKM yang cukup baik terhadap perekonomian nasional, tentunya sektor ini masih menyimpan segudang permasalahan yang sangat mendasar. UMKM masih lemah dalam kemampuan manajemen usaha, kualitas sumber daya manusia masih terbatas, serta lemahnya akses lembaga keuangan khususnya perbankan. Kota Langsa merupakan salah satu bagian dari wilayah Aceh yang terdiri dari 5 kecamatan, namun demikian penyebaran lokasi usaha kecil tersebut tidak merata di semua kecamatan

#### **4. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia**

Kualitas sumber daya manusia (SDM) berperan penting dalam pembangunan kota. Manusia sebagai human capital pembangunan tidak akan berfungsi optimal bila tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas SDM. Kota telah mengalami kemajuan penting dalam peningkatan kualitas SDM yang diukur dari Human Development Index atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Data BPS menunjukkan IPM kota sebesar 72,22 pada tahun 2007. Angka IPM tersebut meningkat signifikan hingga mencapai 74,37 pada tahun 2011 dan termasuk dalam kategori menengah atas. Namun demikian, peningkatan IPM tersebut belum sepenuhnya berimplikasi signifikan dalam upaya peningkatan taraf hidup masyarakat yang lebih baik dan sejahtera. Angka persentase kemiskinan kota mencapai 14,66 persen dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) mencapai 14,39 persen (kondisi tahun 2011). Negara yang sedang berkembang, dimana terdapat “*Labour surplus economy*”, modal pembangunan tidak dapat digantungkan hanya pada tersedianya atau kemungkinan tersedianya dana investasi. Pembangunan yang demikian itu disamping akan terlalu mahal juga akan mengalami hambatan-hambatan apabila pada suatu waktu sumber investasi menjadi terbatas, baik yang berasal dari pemerintah maupun masyarakat. Sebagai konsekuensi pemikiran bahwa penduduk sebagai modal pokok pembangunan, maka beberapa konsep mengenai tenaga kerja perlu ditinjau kembali. Diantaranya adalah konsep mengenai angkatan kerja, bekerja, menganggur dan lain-lain.

## **5. Terbatasnya Investasi dan Pendapatan Asli Daerah**

Untuk mendorong percepatan pembangunan sekaligus mencapai visi jangka menengah kota dibutuhkan penanaman modal (investasi) yang cukup. Investasi tersebut diperlukan untuk membangun infrastruktur dan pengembangan kawasan perkotaan. Kebijakan pembiayaan pembangunan infrastruktur perlu diprioritaskan, baik bersumber dari dana masyarakat dan dunia usaha, maupun investor asing dalam rangka penyelenggaraan pembangunan sarana dan prasarana secara proporsional. Hal tersebut merupakan tantangan yang memerlukan berbagai penyempurnaan kebijakan investasi di kota dan pengaturan pajak. Kondisi keuangan daerah masih didominasi dana perimbangan (DAU, DAK, dan bagi hasil pajak dan non pajak) dalam mendorong kinerja pembangunan kota. Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak.

Klasifikasi PAD yang terbaru berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 terdiri atas: Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Jenis pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut objek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/ BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/ BUMN, dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

## **KESIMPULAN**

Kemiskinan merupakan fenomena dan masalah yang selalu muncul pada masyarakat pedesaan. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya baik internal maupun eksternal dan tidak mudah untuk dikenali sebab pertama dan utamanya,

# **Analisis Geostrategis Institut Agama Islam Negeri Langsa Dalam Upaya Penekanan Angka Kemiskinan Di kota Langsa**

Faisal Umardani Hasibuan, Andi Tarlis

karena kait mengkait antara tau dengan yang lainnya. Permasalahan kemiskinan harus dilihat sebagai permasalahan sosial karena timbul dari proses dan produk sosial. Oleh karenanya penanggulangannya dilakukan oleh masyarakat secara keseluruhan dan melibatkan berbagai institusi yang memiliki potensi berbeda-beda.

Pembukaan undang-undang dasar 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia dibentuk guna memajukan kesejahteraan umum, berkaitan dengan hal tersebut pembangunan telah dijadikan pilihan mekanisme untuk mengisi kemerdekaan bangsa (Sueharto: 2008). Untuk memajukan kesejahteraan umum secara khusus pemerintah diwajibkan memelihara fakir miskin, mengembangkan jaminan sosial, dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu.

Perguruan Tinggi Agama dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi harus tampil secara moral dan sosial untuk ikut berpartisipasi menekan angka kemiskinan di pedesaan melalui berbagai pendekatan. Sebagai lembaga akademik yang setiap hari melakukan kajian keilmuan harus mampu melahirkan konsep-konsep yang dapat disumbangkan kepada pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan pembangunan. Sebagai bagian dari masyarakat, perguruan tinggi agama harus pro aktif melakukan pemberdayaan masyarakat miskin di pedesaan dengan berbagai macam pendekatan, yaitu pertama pendekatan melalui bahasa agama, kedua pendekatan ilmiah sebagai ciri kerja insan dan lembaga ilmiah, ketiga pendekatan yang memberdayakan masyarakat dengan penekanan pada unsur manusia (pengembangan SDM) dan keempat pendekatan yang mengacu pada kebutuhan teras masyarakat. Faktor-faktor yang signifikan memengaruhi tingkat kemiskinan di kota Langsa yaitu perubahan PDRB (pertumbuhan ekonomi), tingkat pendidikan, jumlah pengangguran dan *share* PDRB sektor pertanian. Pertumbuhan ekonomi, kenaikan tingkat pendidikan dan kenaikan *share* PDRB sektor pertanian akan menurunkan tingkat kemiskinan, sedangkan kenaikan jumlah pengangguran akan menaikkan tingkat kemiskinan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Agustiar, "Kebijaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat di IAIN", dalam Agus Salim Sitompul, (Ed.), *Metodologi Pengabdian Pada Masyarakat*, Yogyakarta : BPPM P3M IAIN Sunan Kalijaga. 1993.

- Ahmad Sukardja, 1994, "Konsepsi Perencanaan Peningkatan Kualitas Hidup asyarakat di Pedesaan (Dilihat dari Pendekatan Agama)", *Makalah*, Palangkaraya : Panitia Lokakarya Nasional Pola Pembinaan dan Pengembangan PPM di Lingkungan IAIN se- Indonesia, 24 Agustus 1994.
- Ali Hasymi, 1994, "Pendayagunaan Hasil Penelitian sebagai Sumber Perencanaan Pengabdian Kepada Masyarakat", *Makalah*, Palangkaraya: Panitia Lokakarya Nasional Pola Pembinaan dan Pengembangan PPM di Lingkungan IAIN Se-Indonesia, 24 Agustus 1994.
- Moh. Abu Suhud, Perguruan Tinggi Agama dan Pengentasan Kemiskinan di Pedesaan : Sebuah Wacana, *Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*. Vol III. No. 2 Desember 2002 : 138-149.
- Oesman Fauzi, 2015 "Analisis Kemiskinan Nelayan Tradisional Di Gampong Kuala Bugak Kecamatan Peureulak Kota, Kabupaten Aceh Timur, Provisnsi Aceh (Universitas Sumatera Utara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik).
- Badan Pusat Statistik Kota Langsa, 2017
- Bappeda Kota Langsa, 2017
- Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan Kota Langsa, 2017
- M. Shabri Abd. Majid, Analisis Tingkat Pendidikan Dan Kemiskinan Di Aceh, *Jurnal Pencerahan* Volume 8, Nomor 1, Juli – Desember 2014.
- Sukirno, Sadono. (2004). *Pengantar Teori Makroekonomi*. Edisi Ketiga. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.